

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan nasional merupakan proses pengembangan keseluruhan sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945. Semakin besar tingkat pembangunan suatu negara mengindikasikan negara tersebut semakin maju dan berkembang (Dewi, 2015). Ada beberapa indikator yang menentukan keberhasilan pembangunan nasional, misalnya pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, indeks kualitas hidup, urbanisasi dan indeks pembangunan manusia, kesehatan, pendidikan (Parsiyo dan Widya, 2013). Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menganalisis sebuah pembangunan nasional yang terjadi di suatu negara dan menjadi perhatian terutama pemerintah.

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam segala aktivitas perekonomian di suatu negara pada periode tertentu. Pada dasarnya aktivitas perekonomian adalah suatu proses penggunaan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan *output*, maka proses ini pada gilirannya akan menghasilkan suatu aliran balas jasa terhadap faktor produksi yang dimiliki oleh masyarakat. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pertumbuhan

ekonomi diantaranya yaitu pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Diantara ketiga komponen tersebut, pendapatan merupakan indikator yang sangat penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka dari itu pertumbuhan ekonomi memacu pemerintah daerah memaksimalkan pemberdayaan segenap sumber daya potensial yang ada, serta membuka peluang kerja sama masyarakat (sebagai investor dan/atau pekerja) guna menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah disebut PDRB (Jaya dan Dwirandra, 2014:81). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Usaha untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu sumber dalam pembiayaan penyelenggaraan kewenangan harus didukung oleh potensi ekonomi yang dimiliki daerah sebagai basis PAD. Hal ini disebabkan karena kemampuan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi kepada daerah sangat tergantung kepada aktifitas ekonomi yang mereka lakukan. Semakin tinggi aktifitas ekonomi yang dilakukan, akan meningkatkan pendapatan yang mereka terima dan seiring dengan hal itu usaha daerah untuk meningkatkan PAD melalui pajak daerah dan retribusi daerah dapat ditingkatkan.

Peranan Pendapatan Asli daerah (PAD) di dalam penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintah daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dipandang sebagai suatu strategi yang memiliki tujuan ganda. *Pertama*, pemberian otonomi daerah merupakan suatu strategi untuk merespon tuntutan masyarakat daerah terhadap tiga permasalahan utama, yaitu *sharing of power*, *distribution of income*, dan kemandirian sistem manajemen di daerah. *Kedua*, otonomi daerah dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkokoh perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas (Mardiasmo, 2002).

Pertumbuhan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Totalitas keseluruhan nilai barang dan jasa yang diperoleh dari seluruh kegiatan perekonomian yang dilakukan daerah disebut PDRB (Jaya dan Dwirandra, 2014:81). Perhitungan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah menggunakan PDRB atas dasar harga konstan.

Fenomena yang terjadi dalam penelitian ini Daerah yang bersangkutan dapat berkembang sesuai dengan kemampuannya sendiri dan tidak tergantung pada pemerintah pusat, dengan mengotimalkan sumber pendapatan daerah yang di hasilkan, dalam hal ini termasuk semua kekayaan yang di kuasai oleh Daerah dengan batas-batas kewenangan yang ada dan selanjutnya di gunakan untuk membiayai semua kebutuhan untuk penyelenggaraan urusan Daerah tersebut baik urusan wajib maupun urusan pilihan, untuk menjalankan kewajibannya dan memenuhi kebutuhan belanja Daerah tersebut. Selain itu dalam wujud komitmennya dalam penerapan otonomi daerah pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi akan mengalokasikan dana-dana yang dapat menambah sumber pendapatan bagi kabupaten/kota yang merupakan hak bagi kabupaten/kota atau yang bersifat bantuan maupun hibah. Fenomena inilah yang menarik untuk di teliti.

Dari beberapa penelitian sebelumnya terdapat perbedaan hasil penelitian yang dimana menurut Setyawan (2013) bahwa DAU berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, DAK memiliki hubungan positif namun tidak signifikan secara statistik dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung, dan sebaliknya DBH memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. Penelitian yang dilakukan Santosa (2013) menunjukkan bahwa PAD dan DAU tidak berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi daerah di 33 provinsi di Indonesia,

sebaliknya DAK dan DBH berpengaruh terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di 33 provinsi di Indonesia. Hasil penelitian Dewi (2015) di Kabupaten/kota di provinsi Bali tahun 2007 – 2013 juga menunjukkan bahwa DBH berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi PAD tidak berpengaruh langsung terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan penelitian terdahulu maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PADA KABUPATEN SABU RAIJUA”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka perumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah : “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Sabu Raijua”.

1.3. Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalah : Bagaimana Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Sabu Raijua?

1.4. Tujuan Dan Kemanfaatan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

- a. Untuk mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten Sabu Raijua.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Akademik

1. Penelitian ini sebagai bahan referensi bagi Fakultas Ekonomi khususnya jalur minat Akuntansi Sektor Publik dalam rangka menambah wawasan berpikir khususnya bagi mahasiswa.

2. Sebagai bahan informasi bagi pembaca atau peneliti yang ingin melakukan penelitian pada bidang yang sama.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dibangun suatu model yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk menambah wawasan pengetahuan dan lebih memahami tentang Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi.